

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KOTA SUNGAI PENUH

YONGKI YEFDIANSYAH, MAT RAMAWI, SRI ELIYANTI
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

yongkiyefdiansyah@gmail.com

matramawi@gmail.com

eliyanti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of e-government in Sungai Penuh city and to determine the supporting and inhibiting factors of e-government implementation in Sungai Penuh city. This research uses a qualitative descriptive approach. The techniques used in this research are library research and field research. The conclusion of this research is that E-Government support has been implemented in Sungai Penuh City since 2012 and in 2017 the E-Government in Sungai Penuh City which is in charge is the Communication, Information, and Statistics Office (Diskominfo) of Sungai Penuh City along with changes the number of SKPD of Sungai Penuh City Government. This is reinforced by the commitment of the local government as stated in Mayor Regulation No. 12/2013, the capacity of the Sungai Penuh City government to obtain funding sources from the Sungai Penuh City Regional Budget (APBD). The government designs all activities based on strategic plans that have been implemented before, the value of the benefits of E-Government is to increase the transparency of the government to the public by publishing through websites such as publishing news on government activities and publication of financial reports.

Keywords: Implementation, E-Government.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *E-Government* di Kota Sungai Penuh serta untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *E-Government* di Kota Sungai Penuh. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif Dimana teknik dalam penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, support *E-Government* mulai diterapkan di Kota Sungai Penuh sejak tahun 2012 dan pada tahun 2017 *E-Government* di Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfo) Kota Sungai Penuh seiring dengan perubahan jumlah SKPD Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Hal ini diperkuat dari komitmen pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013, capacity pemerintah daerah Kota Sungai Penuh memperoleh sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh. Pemerintah merancang semua kegiatan berdasarkan rencana strategis yang sudah diterapkan sebelumnya, value manfaat adanya *E-Government* adalah meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat dengan publikasi melalui

website seperti mempublikasikan berita kegiatan pemerintahan maupun publikasi laporan-laporan keuangan.

Kata Kunci : Implementasi, E-Government.

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan teknologi berkembang sangat pesat sesuai dengan kemajuan zaman, semua bidang kehidupan dituntut untuk serba digital. Dalam hal ini sumber daya manusia diminta untuk ahli dan berbasis teknologi karena semua pekerjaan manusia akan dipermudah dengan menggunakan alat elektronik, tidak menutup kemungkinan pendigitalan pada sektor pemerintahan. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah lama membuat para ilmuwan berinovasi untuk mengembangkannya pada Negara-negara maju serta Negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mempermudah serta mempraktikkan semua bentuk pekerjaan dan pelayanan (Puguh Prasetya Utomo, Krisnawan, 2013). Telah banyak penerapan untuk pendigitalan pada pemerintahan di Indonesia baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini ditujukan agar mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan di Indonesia berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakatnya, karena pelayanan bagi masyarakat adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa pembentukan dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengimplementasian kesejahteraan umum adalah dengan pelayanan publik (Buwono Cokro Robby, 2013.)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di dunia ini telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan Negara, social dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi.

Hal ini pun berlaku dan mengharuskan organisasi untuk terus menerus melakukan pengembangan, peningkatan serta perubahan. Perubahan yang dilakukan organisasi semata-mata untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yakni peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan, peningkatan moral dan kapasitas anggota dan sebagainya. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *E -Government*.

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan lamban dieliminir melalui pemanfaatan *E - Government* menawarkan pelayanan publik bias diakses secara 24 jam, kapanpun, dan dari manapun pengguna berada. *E - Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Dalam konsep *E-Government*, paradigm pelayanan harus dirubah total, *face to face*, satu atap, formulir, loket, antrian, bising, tidak nyaman, tanda tangan, dan kegiatan pelayanan sebagaimana bisa kita lihat atau alami, harus segera di tinggalkan. Sebagai gantinya adalah papan ketik *computer* (keyboard), *central processing unit* (CPU), layar monitor, dan jaringan.

Sehingga pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *E-Government* dalam bentuk intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E - Government* untuk

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi didalam proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis informasi. Yang menyebabkan setiap pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk berlomba-lomba mengintroduksi teknologi informasi kedalam organisasinya salah satunya yakni dengan membuat situs *website*.

Penerapan *E-Government* dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (*transparency*) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun tujuan dari pemerintah untuk mengintroduksikan penerapan *E-Government* ini adalah sebagai salah satu factor pendukung atau pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan *good governance* yang dengan penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi tepat guna dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dan dengan adanya Undang-undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik ini semakin menegaskan bahwa akses publik terhadap suatu informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui juga oleh UUD 1945 Pasal 28 F. Hadirnya UU KIP ini akan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik serta pengawasan atas pelaksanaan roda pemerintahan.

Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi *E -Government* yakni untuk mencapai customer online dan bukan in-line. *E -Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kota di Indonesia yang menerapkan *E-Government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Pembangunan *E-Government* di Kota Sungai Penuh masih tergolong baru. *E-Government* di Kota Sungai Penuh mulai efektif sejak tahun 2012 yang pada saat itu berada dibawah pengelolaan Seksi Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan *E-Government* di Kota Sungai Penuh. Pada Tahun 2012 inilah pembangunan *E-Government* mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Peran Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan/mempublikasikan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah, www.sungaipenuhkota.go.id pada tahun 2012. Hal ini diperkuat dari komitmen pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengembangan *E-Government* dilingkungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, dimana peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan pelayanan system pemerintahan berbasis elektronik di Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2017 *E-Government* di Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfo) Kota Sungai Penuh seiring dengan perubahan jumlah SKPD Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Namun, di dalam perkembangannya *E-Government* mengalami perkembangan yang stagnan. Setelah dikeluarkannya Inpres ini dapat dikatakan bahwa perkembangan implementasi *E-Government* masih jauh dari harapan. Masih banyak lembaga pemerintah, baik dipusat maupun daerah, yang belum menganggap *E-*

Government sebagai prioritas. *E-Government* hanya dipandang sebagai proyek yang harus diikuti dan menjadi trend di kalangan pemerintah.

Potensi yang muncul jika penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik di Kota Sungai Penuh yang dapat berjalan dengan baik akan memungkinkan untuk membawa pusat pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat dengan hanya menggunakan komputer di rumah maupun di kantor. Penerapan *E-Government* memberikan peluang baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik. Selain itu unsur penyimpangan dapat dihindari dan pelayanan dapat disediakan secara efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada DISKOMINFO Kota Sungai Penuh.

2.3. Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

2.3.1.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:131) data primer merupakan suatu data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena.

2.3.1.2. Data Sekunder

Sugiyono (2016:225) menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dapat dikatakan bahwa sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan Asmaina dan lain sebagainya.

2.3.2. Sumber Data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama, data primer yang dalam penelitian ini adalah tanggapan informan yaitu pegawai DISKOMINFO Kota Sungai Penuh dan Masyarakat.

2.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

2.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:9) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari segi cara, pengumpulan data dapat melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan atau gabungan ketiganya. Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan jelas, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu observasi (observasi partisipatif dan observasi terus terang dan tersamar), wawancara, dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:212) wawancara adalah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanya. Penelitian awal dilakukan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tersebut, dan seterusnya kepada masyarakat.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012:214) Observasi (Pengamatan) dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian, ada 3 macam observasi (pengamatan) yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur. Observasi partisipatif artinya peneliti ikut terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang atau objek yang diteliti. Observasi terus terang atau tersamar adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan atau sumber data bahwa dirinya sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga dapat melakukan observasi secara tersamar karena khawatir data yang dibutuhkan sulit untuk didapat dengan alasan rahasia atau sengaja ditutupi dari objek penelitian. Selanjutnya, observasi tak berstruktur adalah pengamatan tidak dilakukan secara berstruktur artinya bisa saja data akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:212) Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang berkaitan dengan kapasitas aparatur negara dalam pelayanan publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, Wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui tentang data yang ingin diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrumen dan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara terstruktur, jawaban alternatifnya pun telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara semi struktur adalah wawancara yang lebih bebas dan peneliti dapat menanyakan hal-hal yang mendalam untuk mengetahui informasi lebih jauh dan detail. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada mereka yang menjadi sampel sumber data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur karena peneliti sudah mengetahui tentang data yang dibutuhkan.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini, sekaligus langsung juga menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.4.2. Alat Pengumpulan Data

- 1) Pedoman Wawancara
- 2) Pensil dan Pena
- 3) Kertas
- 4) Laptop
- 5) Smartphone / Rekaman

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya serta ditambah dengan keterangan yang mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai Implementasi *E-Government* di Kota Sungai Penuh, dan data tersebut disajikan untuk mendukung dalam pengambilan kesimpulan.

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129) analisa data ada tiga cara yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi harus melalui rangkuman atau parafrase.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada kumpulan dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara : Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
2. Triangulasi data, dilakukan dengan cara : Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

2.6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2009: 330).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam peneliti adalah observasi dari hasil tersebut dengan melakukan pengecekan melalui: 1) membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 2) membandingkan wawancara dengan hasil dokumen, 3) membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen, 4) membandingkan wawancara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

2.7. Operasional Konsep

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2006:15), untuk menerapkan konsep- konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh- sungguh. Masing- masing elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.

1. Support (Pendukung)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) atau dukungan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* akan sulit berjalan.

Kata support adalah dukungan, Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan *E-Government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *E-Government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus.

2. Capacity (Kapasitas)

Element Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait menjadi kenyataan.

3. Value (Manfaat)

Elemen ketiga (Value) merupakan aspek yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (demand side), berbagai inisiatif E-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan Value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Indikator Support (Dukungan)

E-Government mulai diterapkan di Kota Sungai Penuh sejak tahun 2012 dan pada tahun 2017 *E-Government* di Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfo) Kota Sungai Penuh seiring dengan perubahan jumlah SKPD Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Hal ini diperkuat dari komitmen pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengembangan *E-Government* dilingkungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, dimana peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan pelayanan system pemerintahan berbasis elektronik di Kota Sungai Penuh. Adanya regulasi ini bertujuan untuk mendorong mempercepat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi website resmi dengan alamat domain yakni www.sungaipenuhkota.go.id. Sosialisasi dilakukan medsos seperti menggunakan facebook, twitter, dan instagram. Akan tetapi untuk pengaplikasian pada masyarakat sendiri dan sampai ke masyarakat itu masih kurang. Pengembangan *E-Government* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam keberlanjutan penerapan *E-Government* di Kota Sungai Penuh dimulai dari fase perencanaan hingga pada fase pematangan *E-Government* di Kota Sungai Penuh. Pengembangan kedepannya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Sungai Penuh adalah berfokus pada pengintegrasian seluruh SKPD yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan adanya hal

itu, berbagai informasi dapat terkoordinasai kedalam satu *server* dengan perandata DISKOMINFO.

3.2. Indikator Capacity (Kemampuan)

Anggaran merupakan permasalahan serius bagi pemerintah daerah. Dalam menerapkan *E-Government*, pemerintah daerah Kota Sungai Penuh memperoleh sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh. Pemerintah merancang semua kegiatan berdasarkan rencana strategis yang sudah diterapkan sebelumnya. Ketersediaan infrastruktur untuk pendukung penerapan *E-Government* di Kota Sungai Penuh ini memang sudah sangat memadai. Ini dilihat dari adanya infrastruktur komputer, printer, jaringan internet, dan sebagainya. SDM merupakan pemain utama atau subyek yang berperan penting dalam penerapan *E-Government*. SDM pada dasarnya merupakan manusia yang bekerja di pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian dari SDM akan sangat berpengaruh besar pada performa penerapan *E-Government*. Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait pengembangan SDM TIK belum direncanakan dengan baik, sehingga banyak pegawai yang bekerja tidak selaras dengan keahliannya atau menguasai dan tanggap dengan penggunaan teknologi informasi.

3.3. Indikator Value (Manfaat)

Manfaat adanya *E-Government* bagi pemerintah adalah meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat dengan publikasi melalui website seperti mempublikasikan berita kegiatan pemerintahan maupun publikasi laporan-laporan. Selain itu *E-Government* bermanfaat untuk meningkatkan layanan publik dan juga berguna untuk mewujudkan *good governance*. Manfaat adanya *E-Government* bagi masyarakat adalah memudahkan masyarakat dalam mencari segala informasi yang dibutuhkan dan dapat lebih efisien dan efektif.

3.4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *E-Government* di Kota Sungai Penuh

Faktor pendukung dalam implementasi (penerapan) *E-Government* ini adanya regulasi yang mengatur implementasi *E-Government* yang merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penerapan *E-Government* di Kota Sungai Penuh pada umumnya dan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada umumnya. Serta adanya infrastruktur jaringan dan perangkat serta sarana prasarana yang telah memenuhi syarat sehingga menunjang dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan bidang telematika pada Diskominfo Kota Sungai Penuh. Dan adanya keberlanjutan penerapan *E-Government* di Kota Sungai Penuh kedepannya. Faktor penghambat dalam implementasi (penerapan) *E-Government* adalah kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat disebut juga sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur yang cukup dan berkompeten menjadi salah satu faktor dalam menunjang tersenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Serta kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan seringkali beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang. Dan masyarakat belum sepenuhnya mengerti komputer atau internet, serta budaya lokal masyarakat yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan berbagai pekerjaan dari pada menggunakan teknologi informasi.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan dari indikator – indikator budaya paternalistik ialah sebagai berikut:

1. Support

E-Government mengenai indikator support bahwa *E-Government* mulai diterapkan di Kota Sungai Penuh sejak tahun 2012 dan pada tahun 2017 *E-Government* di Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfo) Kota Sungai Penuh seiring dengan perubahan jumlah SKPD Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Hal ini diperkuat dari komitmen pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh dengan website resmi yaitu www.sungaipehukota.go.id. Sosialisasi dilakukan medsos seperti menggunakan facebook, twitter, dan instagram. Akan tetapi untuk pengaplikasian pada masyarakat sendiri dan sampai ke masyarakat itu masih kurang.

2. Capacity

E-Government mengenai indikator capacity bahwa dalam menerapkan *E-Government*, pemerintah daerah Kota Sungai Penuh memperoleh sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait pengembangan SDM TIK belum direncanakan dengan baik, sehingga banyak pegawai yang bekerja tidak selaras dengan keahliannya atau menguasai dan tanggap dengan penggunaan teknologi informasi.

3. Value

E-Government mengenai indikator capacity bahwa manfaat adanya *E-Government* bagi pemerintah adalah meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat dengan publikasi melalui website seperti mempublikasikan berita kegiatan pemerintahan maupun publikasi laporan-laporan keuangan. Selain itu *E-Government* bermanfaat untuk meningkatkan layanan publik dan juga berguna untuk mewujudkan *good governance*. Manfaat adanya *E-Government* bagi masyarakat adalah memudahkan masyarakat dalam mencari segala informasi yang dibutuhkan dan dapat lebih efisien dan efektif.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dipublikasikan jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang : Bayu Media.
- Arief Sosiawan, Edwi. 2008. *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. Jurnal Penelitian Fisip UPN Yogyakarta.
- Arifin Tahir, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Budiati Ayuning. 2003. *Improving E-Government Implementation to Enhance Public Service*. Monash University. Australia.
- Denkin Norman K. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hardjaloka, Loura. 2014. *Studi Penerapan e-government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik*. *Jurnal Rechtsvinding*. 3 (3): 435-452
- Holle, E.S. (2011). *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. *Jurnal Sasi*, 17(3), 21-30.
- Indrajit, dkk. 2006. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknolgi Digital*. Yogyakarta : Andi.
- Indrajit, R.E. 2002. *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Puguh Prasetya Utomo, Krisnawan, Rachmad Gustomy. (2013). *Sebagai Media Pemenuhan Hak Politik Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Universitas Gadjah Mada.
- Rianto, Budi dkk. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya.
- Sekeran. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di kelurahan Tanjung Unggat)*
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah BPD*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
- Yustianto. 2006. *Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi Transformasi Menuju E-Government*. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia*, 3 – 4 Mei. Bandung.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu : Yogyakarta.